

**BERBAGAI LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH
DALAM RANGKA PERBAIKAN KINERJA PENANGANAN JEMBATAN TIMBANG**

- 1) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Dalam Bidang LLAJ kepada Dati I dan Dati II dinyatakan bahwa penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor tidak termasuk dalam jenis urusan yang diserahkan, baik kepada Dati I maupun Dati II sehingga penyelenggaraannya tetap dilaksanakan oleh Kanwil Departemen Perhubungan. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, pelaksanaan pengawasan muatan lebih angkutan barang di jalan melalui jembatan timbang telah dilimpahkan menjadi kewenangan Propinsi.
- 2) Berdasarkan KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Kantor Wilayah Departemen Perhubungan (yang dalam konteks otonomi daerah dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Provinsi) bertanggung jawab atas penyelenggaraan penimbangan dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi terkait. Direktur Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Jalan.
- 3) Telah disusun konsep policy statement (yang melibatkan departemen-departemen terkait) dalam rangka penanggulangan muatan lebih secara komprehensif dan terpadu dan telah disampaikan kepada Asisten Menko Ekuin bidang Industri dan Jasa dan Deputi III Bappenas c.q. Karo Perhubungan dan Transportasi melalui surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. AJ. 004/13/20/DRJD/99 tanggal 10 Juni 1999. Statement policy yang diharapkan dapat menjadi suatu instrumen perekat kebijakan secara terintegrasi antar institusi terkait yang terlibat dalam penanganan muatan lebih namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.
- 4) Sebagai pelaksanaan PP. No. 25 tahun 2000 bahwasanya kewenangan pengelolaan jembatan timbang ditangan propinsi, saat ini di beberapa daerah (propinsi) telah mengeluarkan kebijaksanaan muatan lebih berupa Peraturan Daerah.
- 5) Berkaitan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam penanggulangan muatan lebih melalui penetapan kelas jalan telah dikeluarkan :
 - a. Kep. Menhub No. KM. 55 tahun 1999 tentang Pernetapan Kelas Jalan di Pulau Jawa;
 - b. Kep. Menhub No. KM. 1 tahun 2000 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Sumatera;
 - c. Kep. Menhub No. KM. 13 tahun 2001 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Sulawesi.
 - d. Kep. Menhub No. KM 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Kalimantan.
- 6) Kebijaksanaan terhadap pengendalian impor kendaraan barang telah dikeluarkan :
 - a. Keputusan Menperindag No. 278/MPP/Kep/7/2000 tentang Impor Mesin, Peralatan Mesin dan Barang Modal Bukan Baru;
 - b. Keputusan Menperindag No. 172/MPP/Kep/5/2001 tentang Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru;

- c. Dan telah dikeluarkan Keputusan-keputusan Dirjen Hubdat terhadap pengesahan type kendaraan bermotor.
- 7) Dalam pengendalian terhadap modifikasi rancang bangun, jajaran Departemen Perhubungan telah dan akan terus melaksanakan pengendalian modifikasi rancang bangun, baik pada saat pengujian pertama kali (persetujuan rancang bangun) maupun pada waktu melakukan pengujian berkala.
- 8) Penanganan muatan lebih melalui pengawasan dengan jembatan timbang dalam rangka pelaksanaan PP No. 25 tahun 2000, telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas nama Menteri Perhubungan No. AJ.108/3/20/DRJD/2001 kepada para Gubernur seluruh Indonesia, yang memberikan pedoman tentang penentuan lokasi jembatan timbang, pengawasan dan pengendalian, standar teknis jembatan timbang, pelaksanaan operasional, pemeliharaan dan pengelolaan jembatan timbang.
- 9) Untuk lebih mengefektifkan fungsi pengawasan melalui jembatan timbang statis telah didukung dengan pengadaan alat timbang portable sebanyak 15 set pada tahun anggaran 1999/2000 dan juga melalui kegiatan NSRRP untuk mendukung penanganan muatan lebih di Sumatera Bagian Utara telah diadakan jembatan timbang portable sebanyak 6 set dan pada saat ini melalui proyek SRRP sedang dilaksanakan bantuan teknis untuk penanganan muatan lebih yang dalam kegiatannya juga akan dilakukan rehabilitasi terhadap jembatan timbang yang ada.
- 10) Dalam rangka penyempurnaan kebijaksanaan penanganan muatan lebih melalui penyelenggaraan jembatan timbang melalui bantuan Bank Dunia saat ini tengah dilakukan kegiatan Proyek Standarisasi Perencanaan Jaringan dan Keselamatan Transportasi Jalan, Ditjen Perhubungan Darat dengan lingkup pekerjaan penataan sistem penanganan jembatan timbang yang akan diujicobakan (Penanganan Jembatan Timbang Metode Baru) di beberapa provinsi :
- a. Sumatera Barat (Jembatan Timbang : Kamang, Sungai Langsek, Lubuk Selasih);
 - b. Nanggroe Aceh Darusalam (Jembatan Timbang Seumadam)
- Sistem penanganan jembatan timbang metode baru ini akan melibatkan peran sektor swasta dalam manajemen jembatan timbang yang juga akan dirumuskan format kebijaksanaan penanganan jembatan timbang secara berkesinambungan (sustainable policy). Sustainable policy ini apabila telah diputuskan oleh pemerintah kemudian akan diterapkan secara nasional.
- 11) Tindakan-tindakan korektif terus dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Departemen Perhubungan dan Departemen Dalam Negeri dalam rangka pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah terutama dalam hal penanganan jembatan timbang yaitu melalui verifikasi terhadap produk-produk Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
- 12) Dalam rangka pembinaan teknis telah dikeluarkan pedoman operasional berupa Surat Edaran Menteri Perhubungan No. SE.01/AJ.307/DRJD/2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih.

DATA PERKEMBANGAN UPPKB DI INDONESIA
 Berdasarkan Surat Dirjen. Hubdat No. AJ.408/1/1/DRJD/2005 Tanggal 14 Januari 2005
 Tentang Pendataan Jembatan Timbang

No	PROPINSI	Lokasi UPPKB Yang dibangun (Posisi 1985)	Jumlah>Nama UPPKB berdasarkan SK Dirjen No. 72/AJ 109/DRJD/2000 tgl 15 Feb 2000	Sejak Otonomi Daerah (Posisi 2004)		KETERANGAN
				Jumlah UPPKB yang Beroperasi	KAPASITAS (Ton)	
1	2	3	4	8	9	10
1	Aceh	10 buah 1. Seumadam 2. Bayu 3. Meuredu 4. Lamno 5. Lambaro 6. Peureulak 7. Laiken 8. Blang Kuyu 9. Bakti 10. Simpang Rima	4 buah 1. Seumadam 2. Bayu 3. Meuredu 4. Lamno	1 buah 1. Seumadam (Kab. Aceh Timur)	60	ADA LAPORAN Pilot Project
2	Sumatera Utara	25 buah 1. Jembatan Merah 2. Tj. Morawa I 3. Aek Batu 4. Doulu 5. Gebang 6. Dolok Estate 7. Dolok Merangir 8. Aek Kanopan 9. Labuhan Deli 10. Titipapan 11. Tj. Morawa II 12. Simpang Dua 13. Pal XI 14. Pandan 15. Simpang Runding 16. Rambutan 17. Merek 18. Binjai 19. Tanjung Tiram 20. P. Sidempuan 21. Rantau Prapat 22. Pancuran Batu 23. Porsea 24. Lubuk Pakam 25. Simpang Kawat	8 buah 1. Jembatan Merah 2. Tj. Morawa I 3. Aek Batu 4. Doulu 5. Gebang 6. Dolok Estate 7. Dolok Merangir 8. Aek Kanopan	12 buah 1. Gebang (Kab. Langkat) 2. Tj. Morawa I (Kab. Deli Serdang) 3. Tj. Morawa II (Kab. Deli Serdang) 4. Jembatan Merah (Kab. Mandailing) 5. Aek Batu (Kab. Labuhan Batu) 6. Doulu (Kab. Tanah Karo) 7. Dolok Estate (Kab. Asahan) 8. Dolok Merangir (Kab. Simalungun) 9. Pandan (Kod. Sibolga) 10. Simpang Runding (Kab. Dairi) 11. Simpang Dua (Kod. Pematang Siantar) 12. Pal XI (Kab. Tapanuli Selatan)	40 40 40 40 40 40 40 40 10 40 50 40	ADA LAPORAN
3	Sumatera Barat	11 buah 1. Beringin Panti 2. Sungai Lansat 3. Lubuk Selasih 4. Tj. Pati 5. Setangkai 6. Kubu Kerambil 7. Lubuk Buaya 8. Tapan 9. Padang Hijau 10. Teluk Bayur 11. Kamang	9 buah 1. Beringin Panti 2. Sungai Lansat 3. Lubuk Selasih 4. Tj. Pati 5. Setangkai 6. Kubu Kerambil 7. Lubuk Buaya 8. Tapan 9. Kamang	9 buah 1. Beringin Panti (Kab. Pasaman) 2. Sungai Lansat (Kab. Sawahlunto) 3. Lubuk Selasih (Kab. Solok) 4. Tj. Pati (Kab. Payakumbuh) 5. Setangkai (Kab. Tanah Datar) 6. Kubu Kerambil (Kab. Tanah Datar) 7. Lubuk Buaya (Kod. Padang) 8. Tapan (Kab. Pesisir Selatan) 9. Kamang (Kab. Sawah Lunto)	- 60 60 - - - - - 60	BELUM ADA LAPORAN Pilot Project Pilot Project Pilot Project
4	Riau	6 buah 1. Taluk Kuantan 2. Rantau Berangin 3. Duri 4. Tanjung Pinang 5. Rumbai 6. Simpang Tiga	4 buah 1. Taluk Kuantan 2. Rantau Berangin 3. Duri 4. Tanjung Pinang	4 buah 1. Taluk Kuantan (Kab. Indragiri Hulu) 2. Rantau Berangin (Kab. Kampar) 3. Duri (Kab. Bengkalis) 4. Tanjung Pinang (Kab. Riau kepulauan)	- - - -	BELUM ADA LAPORAN
5	Jambi	6 buah 1. Muara Bungo 2. Sarolangun 3. Sungai Penuh 4. Muara Bullian 5. Kenali Besar 6. Kenali Asam	4 buah 1. Muara Bungo 2. Sarolangun 3. Sungai Penuh 4. Muara Bullian	3 buah 1. Muara Bungo (Kab. Bungo Tebo) 2. Sungai Penuh (Kab. Kerinci) 3. Bukit Baling	15 20 40	ADA LAPORAN
6	Bengkulu	4 buah 1. Pd. Ulak Tanding 2. Tais 3. Air Sebakul	3 buah 1. Pd. Ulak Tanding 2. Tais 3. Air Sebakul	3 buah 1. Pd. Ulak Tanding (Kab. Rejang Lebong) 2. Tais (Kab. Bengkulu Selatan) 3. Air Sebakul (Kod. Bengkulu)	20 20 40	ADA LAPORAN

No	PROPINSI	Lokasi UPPKB Yang dibangun (Posisi 1985)	Jumlah>Nama UPPKB berdasarkan SK Dirjen No. 72/AJ 109/DRJD/2000 tgl 15 Feb 2000	Sejak Otonomi Daerah (Posisi 2004)		KETERANGAN
				Jumlah UPPKB yang Beroperasi	KAPASITAS (Ton)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
		4. Permu/Curup				

No	PROPINSI	Lokasi UPPKB Yang dibangun (Posisi 1985)	Jumlah>Nama UPPKB berdasarkan SK Dirjen No. 72/AJ 109/DRJD/2000 tgl 15 Feb 2000	Sejak Otonomi Daerah (Posisi 2004)		KETERANGAN
				Jumlah UPPKB yang Beroperasi	KAPASITAS (Ton)	
1	2	3	4	5	6	7
7	Sumatera Selatan	11 buah 1. Betung 2. Muara Beliti 3. Sp. Indralaya 4. Martapura 5. Kertapati 6. Megang 7. Muara Enim 8. Pagar Alam 9. Saung Naga 10. Talang Betutu 11. Muara Dua	4 buah 1. Betung 2. Muara Beliti 3. Sp. Indralaya 4. Martapura	6 buah 1. Megang 2. TanjuK Sakti (Kab. Lahat) 3. Muara Beliti (Kab. Musi Rawas) 4. P. Panggang (Kab. OKI) 5. PPT. Senawar Jaya (Kab. Muba) 6. PPT. Kota Baru (Lubuk Linggau)	20 15 15 60 60 60	ADA LAPORAN
8	Bangka Belitung	2 buah 1. Sp. Tempilang 2. Tj. Pandan	- buah	- buah	-	ADA LAPORAN (3 UPPKB dlm kondisi rusak)
9	Lampung	5 buah 1. Way Urang 2. Tegineneng 3. Aji Kagungan 4. Gayam 5. Blambangan Umpu	3 buah 1. Way Urang 2. Tegineneng 3. Aji Kagungan	5 buah 1. Gayam 2. Tegineneng (Kab. Lampung Selatan) 3. Blambangan Umpu 4. P. Panggang 5. Aji Kagungan	20 15 20 60 60	ADA LAPORAN
10	Banten	3 buah 1. Cikande 2. Batu Ceper 3. Cicere	- - -	1 buah 1. Cikande (Kab. Serang)	-	BELUM ADA LAPORAN
11	Jawa Barat	17 buah 1. Balong Gandu 2. Weru Duwur 3. Cibaragalan 4. Sindang Rasa 5. Kemang 6. Tomo 7. Gentong 8. Bulak Kapal 9. Bojong 10. Cinunuk 11. Weru 12. Ciluwek 13. Bandung 14. Cibitung 15. Tajur 16. Indramayu 17. Losari	8 buah 1. Balong Gandu 2. Weruduwur 3. Cibaragalan 4. Sindang Rasa 5. Kemang 6. Tomo 7. Gentong	8 buah 1. Balong Gandu (Kab. Karawang) 2. Weruduwur (Kab. Cirebon) 3. Cibaragalan (Kab. Purwakarta) 4. Sindang Rasa (Kab. Ciamis) 5. Kemang (Kab. Bogor) 6. Tomo (Kab. Sumedang) 7. Gentong (Kab. Tasikmalaya) 8. Losarang (Kab. Indramayu)	- - - - - -	BELUM ADA LAPORAN Pantura Pantura
12	Jawa Tengah	17 buah 1. Tanjung 2. Subah 3. Klepu 4. Sambong 5. Katonsari 6. Wanareja 7. Sroyo 8. Banyu Dono 9. Kledung 10. Sarang 11. Aji Barang 12. Tugu 13. Pringsurat 14. Salam 15. Lebuawu 16. Gubug 17. Selogiri	10 buah 1. Tanjung 2. Subah 3. Klepu 4. Sambong 5. Katon sari 6. Wanareja 7. Sroyo 8. Banyudono 9. Kledung 10. Sarang	17 buah 1. Tanjung Kab. Brebes 2. Subah (Kab. Batang) 3. Klepu (Kab. Semarang) 4. Sambong (Kab. Blora) 5. Katon sari (Kab. Demak) 6. Wanareja (Kab. Cilacap) 7. Toyoga (Kab. Sragen) 8. Banyudono (Kab. Boyolali) 9. Butuh (Kab. Purworejo) 10. Sarang (Kab. Rembang) 11. Aji Barang (Kab. Banyumas) 12. Tugu (Kab. Semarang) 13. Pringsurat (Kab. Temanggung) 14. Salam (Kab. Magelang) 15. Lebuawu (Kab. Jepara) 16. Gubug (Kab. Purwokerto) 17. Selogiri (Kab. Wonogiri)	80 80 40 40 80 40 80 40 80 80 40 40 40 40 80 40	ADA LAPORAN Pantura Pantura Pantura Pantura
13	DI Yogyakarta	4 buah 1. Kulwaru 2. Depok 3. Piyungan 4. Dongkelan	2 buah 1. Kulwaru 2. Depok	2 buah 1. Kulwaru (Kab. Kulon Progo) 2. Depok (Kab. Sleman)	40 20	ADA LAPORAN

No	PROPINSI	Lokasi UPPKB Yang dibangun (Posisi 1985)	Jumlah>Nama UPPKB berdasarkan SK Dirjen No. 72/AJ 109/DRJD/2000 tgl 15 Feb 2000	Sejak Otonomi Daerah (Posisi 2004)		KETERANGAN
				Jumlah UPPKB yang Beroperasi	KAPASITAS (Ton)	
1	2	3	4	5	6	7
14	Jawa Timur	18 buah 1. Widodaren 2. Lamongan 3. Trosobo 4. Watudodol 5. Rejoso 6. Trowulan 7. Singosari 8. Klakah 9. Guyangan 10. Besuki 11. Pojok 12. Rambi Gundam 13. Baureno 14. Socah 15. Candi II 16. Kejayan 17. Kalibaru Manis 18. Candi I	13 buah 1. Widodaren 2. Lamongan 3. Trosobo 4. Watudodol 5. Rejoso 6. Trowulan 7. Singosari 8. Klakah 9. Guyangan 10. Besuki 11. Pojok 12. Rambi Gundam 13. Socah	17 buah 1. Singosari (Kab. Malang) 2. Rejoso (Kab. Pasuruan) 3. Sedarum (Kab. Pasuruan) 4. Klakah (Kab. Lumajang) 5. Trosobo (Kab. Sidoarjo) 6. Trowulan (Kab. Mojokerto) 7. Mojoagung (Kab. Jombang) 8. Guyangan (Kab. Nganjuk) 9. Pojok (Kab. Tulung Agung) 10. Rambi Gundam (Kab. Jember) 11. Watudodol (Kab. Banyuwangi) 12. Besuki (Kab. Situbondo) 13. Widodaren (Kab. Ngawi) 14. Lamongan (Kab. Lamongan) 15. Baureno (Kab. Bojonegoro) 16. Socah (Kab. Bangkalan) 17. Kalibaru Manis (Kab. Banyuwangi)	40 80 80 40 40 80 80 40 40 40 40 40 80 40 80 40 80	ADA LAPORAN Pantura Pantura Pantura Pantura Pantura Pantura TMT 5 Maret 2004 Pantura TMT 5 Maret 2004
15	Bali	4 buah 1. Cekik 2. Batu Bulan 3. Seririt 4. Bungkulan	3 buah 1. Cekik 2. Batubulan 3. Seririt	3 buah 1. Cekik (Kab. Jembrana) 2. Batubulan (Kab. Gianyar) 3. Seririt (Kab. Buleleng)	40 21 40	ADA LAPORAN Uji Petik / 1 x dlm 1 bulan Uji Petik / 1 x dlm 1 bulan Uji Petik / 1 x dlm 1 bulan
16	NTB	3 buah 1. Kediri 2. Bertais 3. Sumbawa Besar	3 buah 1. Kediri 2. Bertais 3. Sumbawa Besar	3 buah 1. Kediri (Kab. Lombok Barat) 2. Bertais (Kab. Lombok Barat) 3. Sumbawa Besar (Kab. Sumbawa)	- - -	BELUM ADA LAPORAN
17	NTT	3 buah 1. Oesapa 2. Nun Baun Sabu 3. Watu Alo	3 buah 1. Oesapa 2. Nun Baun Sabu 3. Watu Alo	3 buah 1. Oesapa (Kod. Kupang) 2. Nun Baun Sabu (Kab. Kupang) 3. Labuan Bajo (Kab. Manggarai Barat)	15 20 40	ADA LAPORAN Alat Belum Dikalibrasi Alat Belum Dikalibrasi Alat Belum Dikalibrasi
18	Kalimantan Barat	5 buah 1. Siantan 2. Sedau 3. Sei Pinyuh 4. Kp. Tanjung 5. Bengkayang	2 buah 1. Siantan 2. Sedau	2 buah 1. Siantan (Kota Pontianak) 2. Sedau (Kota Singkawang)	40 40	ADA LAPORAN
19	Kalimantan Tengah	1 buah 1. Pasar Panas	1 buah 1. Pasar Panas	2 buah 1. Pasir Panas (Kab. Barito Timur) 2. Anjir Serapat (Kapuas)	20 40	ADA LAPORAN
20	Kalimantan Selatan	6 buah 1. Liang Anggang 2. Pleihari 3. Tungkap 4. Tibung Raya 5. Muara Tapus 6. Mabu'un Raya	1 buah 1. Liang Anggang	1 buah 1. Liang Anggang (Kab. Banjar)	40	ADA LAPORAN
21	Kalimantan Timur	1 buah 1. Karang Joang	1 buah 1. Karang Joang	1 buah 1. Karang Joang (Kod. Balikpapan)	40	ADA LAPORAN
22	Sulawesi Utara	6 buah 1. Wangurer 2. Amurang 3. Iniboto 4. Pineleng 5. Batuda 6. Kauditan	4 buah 1. Wangurer 2. Amurang 3. Iniboto 4. Pineleng	4 buah 1. Wangurer (Kod. Bitung) 2. Amurang (Kab. Minahasa) 3. Iniboto (Kab. Bolaang Mongondow) 4. Pineleng (Kab. Minahasa)	- - -	BELUM ADA LAPORAN
23	Sulawesi Tengah	3 buah 1. Kayumalue 2. Toboli 3. Biromaru	2 buah 1. Kayumalue 2. Toboli	2 buah 1. Kayumalue (Kod. Palu) 2. Toboli (Kab. Donggala)	40 20	ADA LAPORAN
24	Sulawesi Tenggara	2 buah 1. Sambilambo 2. Lepo-lepo	1 buah 1. Sambilambo	1 buah 1. Sambilambo (Kab. Kolaka)	20	ADA LAPORAN

No	PROPINSI	Lokasi UPPKB Yang dibangun (Posisi 1985)	Jumlah>Nama UPPKB berdasarkan SK Dirjen No. 72/AJ 109/DRJD/2000 tgl 15 Feb 2000	Sejak Otonomi Daerah (Posisi 2004)		KETERANGAN
				Jumlah UPPKB yang Beroperasi	KAPASITAS (Ton)	
1	2	3	4	8	9	10
25	Sulawesi Selatan	10 buah 1. Macoppa 2. Tonrokassi 3. Datae 4. Larompong 5. Paku 6. Tana Batue 7. Lumpue 8. Sunggu Minasa 9. Sajoanging 10. Buntu Datu	6 buah 1. Macoppa 2. Tonrokassi 3. Datae 4. Larompong 5. Paku 6. Tanah Batue	12 buah 1. Macoppa (Kab. Maros) 2. Pallangga (Kab. Gowa) 3. Somba Opu (Kab. Gowa) 4. Tonrokassi (Kab. Jeneponto) 5. Lumpue (Kota Parepare) 6. Datae (Kab. Sidrap) 7. Sajoanging (Kab. Wajo) 8. Tana Batue (Kab. Bone) 9. Bulu Dua (Kab. Soppeng) 10. Walenrang (kab. Wulu) 11. Larompong (Kab. Luwu) 12. Buntu Datu (kab. Tator)	60 30 30 20 50 20 60 60 40 40 20 20	ADA LAPORAN
26	Sulawesi Barat	- buah	- buah	1 buah 1. Paku (Kab. Polmas)	20	BELUM ADA LAPORAN
27	Gorontalo	2 buah 1. Isimu 2. Batuda/Telaga Biru	- - -	2 buah 1. Isimu (Kab. Gorontalo) 2. Marisa (Kab. Pohuwato)	20 40	ADA LAPORAN TMT 3 Maret 2003
28	Maluku	1 buah 1. Passo	1 buah 1. Passo	1 buah 1. Passo (Kod. Ambon)	20	ADA LAPORAN
29	Papua	1 buah 1. Jayapura	1 buah 1. Jayapura	1 buah 1. Jayapura (Kab. Jayapura)	-	BELUM ADA LAPORAN

Data Berdasarkan Laporan

Tidak Termasuk Irjabar, Kep. Riau, Maluku Utara dan DKI. Jakarta

Lampiran Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri
Dalam Negeri

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR JEMBATAN TIMBANG YANG TETAP BEROPERASI

NO	PROPINSI	NAMA UPPKB	KABUPATEN/KOTA	JARINGAN JALAN	JUMLAH (buah)	KET	
1.	NAD	1. Seumadam	Kab.Aceh Tamiang	Lintas Timur, Sumut – Aceh	1	Pilot Project	
2.	Sumatera Utara	1. Gebang	Kab.Langkat	Lintas Timur, Aceh - Sumut	5		
		2. Dolok Merangir	Kab.Simalungun	Lintas Timur Barat, Tebing Tinggi – Tarutung			
		3. Aek Batu	Kab.Labuhan Batu	Lintas Timur Sumut – Riau			
		4. Pal XI	Kab.Tapanuli Selatan	Lintas Barat, Sumut – Sumbar			
		5. Doulu	Kab.Karo	Lintas Barat Timur, Medan – Sidikalang			
3.	Riau	1. Duri	Kab.Bengkalis	Lintas Timur, Riau – Sumut	2		
		2. Taluk Kuantan	Kab.Indragiri Hulu	Lintas Timur, Pekanbaru – Teluk Kuantan – Rengat			
4.	Sumatera Barat	1. Beringin Panti	Kab.Pasaman	Lintas Barat, Sumut – Sumbar	5		
		2. Tanjung Pati	Kab.Limapuluh Kota	Lintas Barat Timur, Payakumbuh - Pekanbaru			
		3. Sei Langsek	Kab.Sawah Lunto	Lintas Tengah, Sumbar – Jambi			Pilot Project
		4. Lubuk Selasih	Kab.Solok	Lintas Tengah, Sumbar – Jambi			Pilot Project
		5. Kamang	Kab.Sawah Lunto	Lintas Timur Tengah,Riau – Sumbar			Pilot Project
5.	Bengkulu	1. Tais	Kab.Seluma	Lintas Barat, Bengkulu - Lampung	2		
		2. Pd. Ulak Tanding	Kab.Rejang Lebong	Lintas Tengah, Bengkulu – Sumsel			
6.	Jambi	1. Sarolangun	Kab. Sarolangun	Lintas Tengah, Sumsel - Jambi	1		
7.	Sumatera Selatan	1. Senawar Jaya	Kab.Musi Banyuasin	Lintas Timur, Jambi – Sumsel	4		
		2. Muara Beliti	Kab.Musi Rawas	Lintas Tengah, Sumsel – Jambi			
		3. Kota Baru	Kab.OKU Timur	Lintas Tengah, Lampung – Sumsel			
		4. Pematang Panggang	Kab.OKI	Lintas Timur, Sumsel – Lampung			

NO	PROPINSI	NAMA UPPKB	KABUPATEN/KOTA	JARINGAN JALAN	JUMLAH (buah)	KET
8.	Lampung	1. Aji Kagungan	Kab.Lampung Utara	Lintas Tengah, Lampung – Sumsel	1	
9.	Banten	1. Cikande	Kab.Serang	Lintas Utara, Banten – Pelabuhan Merak	1	
10.	Jawa Barat	1. Tomo	Kab.Sumedang	Lintas Utara Selatan, Cirebon – Bandung	4	
		2. Balonggandu	Kab.Karawang	Lintas Utara, Cikampek – Cirebon		
		3. Losarang	Kab.Indramayu	Lintas Utara, Jabar – Jateng		
		4. Gentong	Kab.Tasikmalaya	Lintas Selatan, Jateng – Jabar		
11.	Jawa Tengah	1. Tanjung	Kab.Brebes	Lintas Utara, Jabar – Jateng	9	
		2. Wanareja	Kab.Cilacap	Lintas Selatan, Jabar – Jateng		
		3. Sarang	Kab.Rembang	Lintas Utara, Jatim – Jateng		
		4. Butuh	Kab.Purworejo	Lintas Selatan, Jateng – Jogja		
		5. Salam	Kab.Magelang	Lintas Tengah, Jateng – Jogja		
		6. Toyoga	Kab.Sragen	Lintas Tengah, Jateng – Jatim		
		7. Subah	Kab.Batang	Lintas Utara, Jateng – Jabar		
		8. Klepu	Kab.Semarang	Lintas Selatan Utara, Solo – Semarang		
		9. Katonsari	Kab.Demak	Lintas Utara Semarang – Kudus		
12.	D.I. Yogyakarta	1. Kulwaru	Kab.Kulonprogo	Lintas Selatan, Jogja – Jateng	1	
13.	Jawa Timur	1. Trosobo	Kab.Sidoarjo	Lintas Tengah Jatim	7	
		2. Widodaren	Kab.Ngawi	Lintas Tengah, Jatim – Jateng		
		3. Pojok	Kab.Tulung Agung	Lintas Selatan, Jatim – Jateng		
		4. Lamongan	Kab.Lamongan	Lintas Utara, Jatim – Jateng		
		5. Watudodol	Kab.Banyuwangi	Lintas Utara, Bali – Jatim		
		6. Klakah	Kab.Lumajang	Lintas Utara Selatan, Probolinggo – Lumajang		
		7. Mojoagung	Kab.Jombang	Lintas Madiun – Surabaya		
14.	Bali	1. Cekik	Kab.Jembrana	Lintas Selatan Pulau Bali, Bali – Jatim	1	
15.	NTB	1. Kediri	Kab.Lombok Barat	Lintas P. Lombok – P. Bali	2	
		2. Bertais	Kab.Lombok Barat	Lintas P. Sumbawa – P. Lombok		
16.	NTT	1. Labuan Bajo	Kab.Manggarai Barat	Lintas P. Sumbawa – P. Flores	1	
17.	Kalimantan Barat	1. Siantan	Kota Pontianak	Lintas Sie Pinyuh - Pontianak	1	
18.	Kalimantan Timur	1. Karang Joang	Kota Balikpapan	Lintas Utama Samarinda - Balikpapan	1	

NO	PROPINSI	NAMA UPPKB	KABUPATEN/KOTA	JARINGAN JALAN	JUMLAH (buah)	KET
19.	Kalimantan Selatan	1. Liang Anggang	Kab.Banjar	Lintas Kaltim – Kalsel	1	
20.	Kalimantan Tengah	1. Anjir Serapat	Kab.Kapuas	Lintas Kalteng – Kalbar	2	
		2. Pasir Panas	Kab.Barito Timur	Lintas Kalteng - Kalsel		
21.	Sulawesi Utara	1. Inobonto	Kab.Bolaang Mangondow	Lintas Sulut – Gorontalo	2	
		2. Wangurer	Kota Bitung	Lintas Bitung - Manado		
22.	Gorontalo	1. Marisa	Kab.Powohatu	Lintas Gorontalo – Sulteng	1	
23.	Sulawesi Selatan	1. Tana Batue	Kab.Bone	Lintas Maros – Watampone	4	
		2. Macopa	Kab.Maros	Lintas Makasar – Pangkajene		
		3. Larompong	Kab.Luwu	Lintas Sulteng – Sulsel		
		4. Sajoangin	Kab.Wajo	Lintas Palopo – Pare Pare		
24.	Sulawesi Barat	1. Paku	Kab.Polewali	Lintas Sulsel – Sulbar	1	
25.	Sulawesi Tengah	1. Toboli	Kab.Parigi Moutong	Lintas Sulteng – Gorontalo	1	
26.	Sulawesi Tenggara	1. Sabilambo	Kab.Kolaka	Lintas Kolaka – Kendari	1	
27.	Maluku	1. Passo	Kota Ambon	Lintas Ambon – Passo – Laha	1	
28	Papua	1. Jayapura	Kab.Jayapura	Lintas Sentani – Jayapura	1	
JUMLAH					64	

MENTERI PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN

H. MOH. MA'RUF

M. HATTA RAJASA

Lampiran I Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri
Dalam Negeri

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR JEMBATAN TIMBANG YANG DITUTUP

NO	PROPINSI	NAMA UPPKB	KABUPATEN	JUMLAH (buah)	KET
1.	Sumatera Utara	1. T. Morawa I	Deli Serdang	7	
		2. T. Morawa II	Deli Serdang		
		3. Simpang Runding	Dairi		
		4. Dolok Estate	Asahan		
		5. Jembatan Merah	Mandailing		
		6. Simpang Dua	Pematang Siantar		
		7. Pandan	Sibolga		
2.	Riau	1. Tanjung Pinang	Riau Kepulauan	2	
		2. Rantau Berangin	Kampar		
3.	Sumatera Barat	1. Setangkai	Tanah Datar	4	
		2. Kubu Kerambil	Tanah Datar		
		3. Lubuk buaya	Padang		
		4. Tapan	Pesisir Selatan		
4.	Bengkulu	1. Air Sebakul	Bengkulu	1	
5.	Sumatera Selatan	1. Megang	Lubuk Linggau	2	
		2. Tanjung Sakti	Lahat		
6.	Lampung	1. Tegineneng	Lampung Selatan	4	
		2. Blambangan Umpu	Waikanan		
		3. Pematang Panggang	Lampung Utara		
		4. Gayam	Lampung Selatan		
7.	Jambi	1. Sungai Penuh	Kerinci	3	

NO	PROPINSI	NAMA UPPKB	KABUPATEN	JUMLAH (buah)	KET
		2. Muara Bungo	Bungo Tebo		
		3. Bukit Baling	Muara Jambi		
8.	Jawa Barat	1. Weruduwur	Cirebon	4	
		2. Sindang Rasa	Ciamis		
		3. Kemang	Bogor		
		4. Cibaragalang	Purwakarta		
9.	Jawa Tengah	1. Sambong	Blora	7	
		2. Aji Barang	Banyumas		
		3. Tugu	Kod. Semarang		
		4. Pringsurat	Temanggung		
		5. Lebuawu	Jepara		
		6. Gubug	Purwokerto		
		7. Selogiri	Wonogiri		
10.	D.I. Yogyakarta	1. Depok	Sleman	1	
11.	Jawa Timur	1. Singosari	Malang	10	
		2. Rejoso	Pasuruan		
		3. Sedarum	Pasuruan		
		4. Trowulan	Mojokerto		
		5. Guyangan	Nganjuk		
		6. Rambigundam	Jember		
		7. Besuki	Situbondo		
		8. Baureno	Bojonegoro		
		9. Socah	Bangkalan		
		10. Kalibaru Manis	Banyuwangi		
12.	Bali	1. Batubulan	Gianyar	2	
		2. Seririt	Buleleng		
13.	NTB	1. Sumbawa Besar	Sumbawa	1	
14.	NTT	1. Oesapa	Kodya Kupang	2	
		2. Nun Baun Sabu	Kota Kupang		

NO	PROPINSI	NAMA UPPKB	KABUPATEN	JUMLAH (buah)	KET
15.	Kalimantan Barat	1. Sedau	Kota Singkawang	1	
16.	Sulawesi Utara	1. Amurang	Minahasa	2	
		2. Pineleng	Minahasa		
17.	Gorontalo	1. Isimu	Gorontalo	1	
18.	Sulawesi Selatan	1. Palangga	Goa	8	
		2. Somba Opu	Goa		
		3. Tonrokassi	Jeneponto		
		4. LumpuE	Parepare		
		5. DataE	Sidrap		
		6. Bulu Dua	Sopeng		
		7. Walenrang	Luwu		
		8. Buntu Datu	Tator		
19.	Sulawesi Tengah	1. Kayumalue	Lintas Palu - Pantolan	1	
	JUMLAH			63	

MENTERI DALAM NEGERI

MENTERI PERHUBUNGAN

H. MOH. MA'RUF

M. HATTA RAJASA